

**OTONOMI SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR,
MENYONGSONG ASEAN *ECCONOMY COMMUNITY* (AEC)**
(Rekonseptualisasi Pokok Pikiran Ki Hadjar Dewantara Untuk Pendidikan Maluku Utara)

Irwan Djumat

Dosen Program Studi PKn FKIP Universitas Khairun

Email: irwandjumat73@gmail.com

Abstract

School autonomy with its local curriculum as a sign for an area will provide opportunities for the region to develop its regional potential, including North Maluku, where most of the people live in coastal areas. Regional autonomy opens up space for the region to improve its education, and the coastal communities of North Maluku must be of special concern because of the potential of fisheries, coral reefs, mangrove forests, marine tourism islands, and others not touched by skilled hands, because they are not taught in education. Not to mention the local potential and cultural values of the people who are very very diverse which tend to be ignored. Even though all of this is the foundation supporting the national strength and integrity of the NKRI. Over time, the ASEAN Economy Community (AEC) or the ASEAN Economic Community (MEA) was present and became a challenge for the people of North Maluku. If the education of the people of North Maluku is not qualified and ignores local values, then the output of education will be spectators and slaves in their own country. Ki Hadjar Dewantara has reminded us that "our culture is pressured by European culture; this is good, but even the big language seems to be hanging up ... The tools for reducing that language are: ... education, education for our children, for many people in our society.

Key Words: *Otonomi, local curriculum, asean economy community*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu bentuk proses untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Hal ini dimungkinkan karena manusia sejak dilahirkan tidak pernah lepas dari yang namanya pendidikan, baik pendidikan dilingkungan keluarga, pendidikan di masyarakat, maupun pendidikan di sekolah. Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan arti pentingnya tujuan hidup. Pendidikan yang dimaksudkan bukan sekedar pendidikan yang mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana menghitung, menulis yang baik, dan membaca yang baik, melainkan harus memiliki metode dan sistem yang direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan manusia. Metode dan sistem ini harus fleksibel, tidak kaku, lugas, luwes, dan mudah dipahami oleh

pelaksana pendidikan itu sendiri, oleh orang tua peserta didik, peserta didik, oleh masyarakat, dan bahkan oleh pengambil kebijakan.

Berangkat dari kenyataan tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka mendorong pula terjadinya otonomi pendidikan. Uraian ini ingin mengetengahkan pendapat bahwa yang terpenting dan amat diperlukan sekolah saat ini bukan otonomi pendidikan, melainkan otonomi sekolah. Salah satu buktinya: seorang kepala sekolah SD Negeri di sebuah Desa di Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah) yang baru dua bulan memangku jabatan kepala sekolah menyatakan sikapnya "kalau sekolah di beri otonomi penuh, saya akan mati-matian mengembangkan mutu pembelajaran, tetapi jika jika masih saja seperti tahun-tahun yang lalu, saya akan minta diturunkan pangkatnya menjadi guru biasa saja" (wawancara: Kompas, 19 Oktober 2000). Data ini sudah 15 tahun yang lalu, tetapi sangat menggelitik. Artinya di era sekarang otonomi sekolah itu bukan lagi sebuah wacana tetapi kebutuhan.

Jika dianalisis pernyataan kepala sekolah ini, beliau dengan hati yang lapang sangat merindukan yang namanya otonomi sekolah. Ada apa dengan otonomi sekolah pada Masyarakat Pesisir di Era *Asean Economy Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kajian dalam tulisan ini didekati lewat pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara dalam memotret pendidikan Maluku Utara dengan menggunakan metode kajian Kepustakaan (*library reseach*) dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Otonomi Sekolah Meningkatkan Kualitas Akademik

Perkataan otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani "*autos*" yang berarti sendiri, dan "*nomos*" yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987: 9). Secara etimologi, otonomidiartikan sebagai *zelfwetgeving* atau "pengundangan sendiri" (Danuredjo, 1977), "mengatur atau memerintah sendiri" (Nugroho, 2000: 46). Koesoemahatmadja (1979: 9) mengatakan otonomi selain mengandung arti "perundangan", juga mengandung pengertian "pemerintahan" (*bestuur*). Saleh (1963) mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Wayong (1979: 16) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri, termasuk mengatur pendidikannya sendiri secara otonom (otonomi).

Mengapa yang terpenting adalah otonomi sekolah dan buka otonomi pendidikan?. Salah satu kesimpulan dari hasil penelitian tahun 1998, menyebutkan, bahwa kualitas akademik sekolah-sekolah di Indonesia sangat rendah, karena sekolah tidak memiliki wewenang apapun kecuali hanya menjadi pelaksana kebijakan belaka. Rendahnya kualitas ini ditunjukkan antara lain: lewat angka kelulusan atas dasar analisis *Kohort* ternyata *kohort* SD dalam enam tahun hanya mencapai 49% dan dalam waktu delapan tahun hanya 70% (Balitbang Depdiknas dan UNICEF, 1998).

Angka ini menggambarkan peserta didik SD tidak belajar dengan benar, buktinya hanya kurang dari separuh murid SD lulus pada tahun keenam, dan hampir dua pertiga peserta didik lulus pada tahun ke delapan. Ini berarti bukan peserta didiknya yang bodoh, tetapi gurunya yang mengajar tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sering terjadi bukan proses pembelajaran yang efektif-aktif-menyenangkan, tetapi tidak aktif-pasif dan membosankan. Seringkali hal-hal yang akademis dikalahkan oleh hal-hal yang administratif, sehingga para guru yang menggunakan jam efektif mengajar bukan untuk mentransfer sejumlah tuntunan, nilai, dan pesan-pesan akademik kepada peserta didik. Di sinilah nampak suasana proses pembelajaran yang sarat dengan kepasifan dan kebosanan. Hal ini sering dialami oleh guru, dan terlebih para peserta didik.

B. Otonomi Sekolah Sebuah Keputusan Politik

Otonomi sekolah menjadi tuntutan logis manakala peningkatan mutu akademik diinginkan oleh sebuah sekolah. Sementara otonomi pendidikan merujuk pada konsekuensi politik dari pelaksanaan UU No. 20 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Otonomi pendidikan sebagai keputusan politik daerah dapat membawa serta otonomi sekolah bila: (1) keputusan tersebut serta-merta mendorong terbentuk dan berfungsinya komite sekolah di tiap sekolah; (2) tertuang secara jelas komitmen Pemda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya; (3) semua sekolah terdorong memiliki rencana induk pengembangan sekolah yang humanis; (4) terbentuk model-model sekolah yang secara mandiri mampu mengembangkan aspek-aspek manajerial kurikulum, mutu kepala sekolah, informasi pendidikan, pembinaan profesionalitas guru, peningkatan budaya literasi guru dan peserta didik; (5) terjadi kompetisi yang intens antar berbagai sekolah, baik oleh guru ataupun peserta didiknya; dan (6)

terbuka peluang untuk tumbuh suburnya sekolah berprestasi, lokal, nasional dan internasional.

Selain itu, otonomi pendidikan menunjang positif otonomi sekolah, jika seluruh keputusan politik mengenai pendidikan di kabupaten/kota mengarah kepada upaya peningkatan efisiensi pengelolaan, mutu, dan relevansi pendidikan di sekolah. Hal ini akan memberikan kewenangan yang lebih besar pada masing-masing sekolah, sehingga sekolah memiliki rasa tanggungjawab yang maksimal. Kondisi seperti ini yang dianggap kondusif bagi peningkatan mutu akademik, sehingga relevansi pendidikan akan dapat ditingkatkan, karena sekolah (kepala sekolah, para guru, staf, peserta didik, penjaga sekolah, dan lain-lain) akan bersinergi dan terlibat dalam keputusan bersama untuk mengembangkan sekolah.

C. Pendidikan Maluku Utara di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

1. Paradigma dan *Mindsed* dalam Menata Pendidikan

Selama ini pendidikan yang berlangsung di Indonesia senantiasa terpusat (*sentralized*), sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah dalam hal pengembangannya harus menunggu instruksi dari pusat, sehingga kewenangan tidak pernah ada di sekolah. Seharusnya sekolah dapat mengambil tanggungjawab terhadap berbagai peristiwa dan keadaan para peserta didiknya di sekolah, dengan melibatkan seluruh komponen dalam proses pendidikan. Keputusan dibuat secara kolektif oleh *stakeholders* (kepala sekolah, dewan guru, seluruh staf, orang tua, tokoh masyarakat, bahkan para peserta didik itu sendiri). Hal ini disebut juga dengan "*community based education*" atau pendidikan berbasis komunitas (Hartoyo, 2001: 3). Pendidikan berbasis komunitas dimaksudkan bahwa masyarakat merupakan konsekuensi logis dari otonomi sekolah.

Menurut Jalal (2001: 5), arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru dapat menyiratkan, bahwa: *pertama*, paradigma lama terlihat bahwa upaya pendidikan lebih cenderung pada sentalistik dan kebijakan bersifat *top down*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, karena pendidikan didisain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, sertateknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah. *Kedua*, paradigma baru, orientasi pendidikan bersifat desentralistik dan kebijakan pendidikan bersifat *bottom up*, orientasi pengembangan pendidikan bersifat *holistik* (artinya pendidikan ditekankan pada kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral,

kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan).

Peran serta ini menurut penulis, menuntut adanya otonomi bagi sekolah, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam memajukan pendidikan nyata hadir dalam kehidupan mereka, karena masyarakat merasa bertanggungjawab pula untuk kelangsungan pendidikan. Artinya pendidikan itu dari-oleh-dan untuk masyarakat itu sendiri dengan prinsip: "*yang menanam adalah masyarakat dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.*"

Otonomi sekolah mensyaratkan proses pembelajaran berlangsung secara aktif (*active learning*), efektif (*effective learning*) dan menyenangkan (*joyfull learning*). Artinya waktu yang tersedia digunakan sepenuhnya oleh guru dan peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran. Para guru mempunyai kebebasan mengatur keseluruhan kurikulum demi terciptanya proses pembelajaran yang efektif-aktif, dan menyenangkan tersebut. Dengan kata lain otonomi sekolah terkait langsung dengan upaya sekolah meningkatkan kualitas akademiknya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, kecuali BP3 atau komite sekolah. Di sinilah akan tercermin proses pengejawantahan arti pendidikan yang sesungguhnya, yakni suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki berbagai potensi dasarnya demi tujuan hidupnya di masa yang akan datang.

Manusia memiliki berbagai potensi dasarnya, dan pendidikanlah yang dapat mengaktualisasikan potensi-potensi itu menjadi lebih berarti. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) manusia yang menjadi objek pendidikan, dalam hal ini para peserta didik yang menyangkut dengan perkembangannya, isi dan materi pengajaran, serta proses belajar mengajar; (2) metode mengajar harus bervariasi: ceramah, diskusi, demonstrasi, *problem solving*, kerja kelompok, dan lain-lain. Semua metode dapat digunakan tergantung nilai efektifitasnya masing-masing selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Artinya harus menghargai kebebasan individu, selama kebebasan itu sejalan dengan fitrahnya peserta didik, sehingga seorang guru dalam mendidik tidak memaksakan peserta didiknya, tetapi harus bertanggungjawab membentuk karakternya. Selama ini yang terjadi adalah kurang adanya penghargaan antara guru dan peserta didik, begitu pula sebaliknya; dan (3) adanya sistem pengajaran berbalik dengan sekali-sekali peserta didik menjadi guru. Di sinilah kemampuan peserta didik akan diuji, sehingga akan mempengaruhi intensitas belajar peserta didik di sekolah dan terlebih di rumah.

Di era otonomi ini, pendidikan tergantung pada apa maunya daerah dan sekolah, sehingga apa yang selama ini melekat pada guru yaitu paradigma *Teaching* (mengajar) dirubah menjadi *Learning* (belajar), atau juga *Teaching fo Learning* (mengajar untuk belajar). Dalam konteks ini, antara guru dan peserta didik terjadi proses bagaimana belajar bersama, dan sekolah di anggap sebagai *Learning Society* (masyarakat belajar) atau Zamroni (2000: 112) menyebut sekolah sebagai “*a mini society*”. Peserta didik tidak dianggap sebagai *Pupil* (siswa), tetapi dianggap sebagai *Leaner* (yang belajar). Hal ditopang pula oleh sistem pemantauan potensi peserta didik sejak dari pendidikan dasar, yaitu: (a) sejak TK peserta didik dipantau kemampuan dasarnya yang paling dominan; (b) ketika di Sekolah Dasar (SD), kemampuan dasar yang dominan ketikan TK mulai diarahkan; (c) kemampuan dasar di SD lebih dibina dan diarahkan ketika berada di bangku SMP; (d) kemampuan peserta didik di SMP akan terlihat jelas keahliannya ketika di SMA (lebih dominan di kemampuan apa, seperti MIPA, Ilmu Sosial, Olahraga dan Seni atau Teknik (Mesin, Elektro, Listrik, atau Tambang); dan (e) ketika di perguruan tinggi sudah lebih dispesifikasi keahliannya sehingga matang dan berkualitas, memiliki pribadi yang tangguh, dan siap bersaing di masyarakat, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai skill dan kemampuan yang dimilikinya. Sistem seperti ini oleh penulis menyebutnya dengan “*Sistem Pendidikan Pemantauan Potensi Terprogram* (S3PT), karena sejak dari TK seorang peserta didik dipantau bakatnya. Namun demikian, untuk mewujudkan ini harus memerlukan komponen pendukung seperti: manajemen yang baik, sumber daya manusia dan sumber dana, serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Apalagi kondisi yang dialami oleh masyarakat pesisir sangat *complicated*.

2. Kebijakan Politik Pendidikan yang Mengayomi Masyarakat Pesisir

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat (Dun, 1999). Kebijakan harus dibuat tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Contoh: penulis menyebut bukan kurikulum muatan lokal, tetapi kurikulum lokal sebagai penciri yang merupakan bagian dari sistem kurikulum nasional. Kurikulum lokal ini sesuai dengan kondisi daerah, karena masyarakat Maluku Utara adalah masyarakat yang kebanyakan hidup di Pesisir dengan SDM apa adanya. Orientasi pembangunan pendidikan Maluku Utara harus ke *Maritim Vision* dengan menjadikan laut sebagai bagian dari hidupnya masyarakat pesisir, karena laut memiliki berbagi potensi yang harus dikembangkan dan dibelajarkan di sekolah. Masyarakat pesisir adalah masyarakat

yang paling banyak mengalami kendala (kompleksitas masalah) dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berwawasan kebhinekaan.

Kebhinekaan masyarakat Indonesia tercermin dalam banyak aspek kehidupan: lingkungan fisik, sosial dan budaya perlu untuk diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum. Realitas kebhinekaan ini merupakan dasar yang logis untuk mengembangkan kurikulum nasional yang berwawasan lokal. Kurikulum yang murni bersifat nasional sulit untuk bisa diterima. Kurikulum yang demikian itu akan menghasilkakan keterasingan pada peserta didik, sebab apa yang dipelajari di sekolah tidak relevan dengan lingkungan sekelilingnya (Zamroni, 2000: 107).

Menurut Dahuri *et al.* (2001), potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok: (1) sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*). Sumberdaya dapat pulih adalah sumberdaya yang dapat dikembangkan atau dilestarikan. Sumberdaya dapat pulih berupa hutan *mangrove* (bakau), terumbu karang, rumput laut, dan sumberdaya perikanan laut. Keempat sumberdaya dapat pulih ini merupakan sumberdaya yang dapat dimaksimalkan potensinya oleh masyarakat pesisir dan sekitarnya baik untuk kelestarian sumberdaya hayati, kepentingan ekonomi, maupun untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.

Sumber daya yang tidak dapat pulih menurut Latama (2008), terdiri dari seluruh mineral dan geologi, antara lain minyak gas, batu bara, emas, timah, nikel, biji besi, batu bara, granit, tanah liat, pasir, dan lain-lain. Sumber daya geologi lainnya adalah bahan baku industri dan bahan bangunan, antara lain kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan, kerikil dan batu pondasi. Lanjut Latama, jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pertahanan keamanan.

Pembangunan masyarakat pesisir difokuskan pada pengentasan masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan karena sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat pesisir dan masih dalam kondisi miskin dengan berbagai keterbatasan aksesibilitas, rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat itu sendiri (Majalah Demersial, April 2007). Di samping itu, pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir juga didasari oleh dinamisasi dan tuntutan dunia Internasional untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini sejalan dengan saran program UNESCO dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable*

development, ESD) yang ditunjukkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan pendidikan daerah pesisir secara berkelanjutan difokuskan pada isu strategis bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas SDM yang berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan. Pada sisi lain, laju kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada penurunan kualitas ekosistem pesisir. Hal ini antara lain disebabkan oleh kegiatan manusia yang bersifat destruktif, seperti pemanfaatan perluasan daratan untuk reklamasi pantai, penebangan pohon bakau, pencemaran perairan oleh lumpur, penambatan jangkar perahu, pencemaran limbah, tumpahan minyak, dan lain-lain (Majalah Demersial, April 2007).

Kebijakan pendidikan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada di daerah. Imron (2002) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Good (1959) menjelaskan kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai, tanpa mengabaikan potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah, termasuk daerah pesisir Maluku Utara yang kaya akan potensi lautnya. Potensi laut seperti: potensi perikanan, terumbu karang, hutan bakau, pulau wisata bahari, dan lain-lain tidak tersentuh oleh tangan-tangan terampil, karena tidak dibelajarkan di bangku pendidikan. Belum lagi potensi lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat yang amat sangat beragam yang cenderung diabaikan. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru, bahwa Maluku Utara tidak lagi berdiri sendiri. Maluku Utara berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga hal-hal yang tradisional yang tidak dibelajarkan di sekolah akan terkubur seiring lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang *traditional market* akan digeser oleh *super market* dan *super mall*. Mengembalikan Pendidikan Maluku Utara pada Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara untuk Menghadap *Asean Economy Community (AEC)*.

Masyarakat Maluku Utara adalah Masyarakat Wilayah Timur (Indonesia Timur) yang oleh orang wilayah barat (Indonesia Barat) di anggap kasar dalam bertutur dan berperilaku. Walaupun sudah mengenyam budaya "*literasi*" (budaya pendidikan) tetapi tetap saja masih dianggap kasar. Tesis orang-orang di wilayah

Barat ini sifatnya *debatable* (masih bisa diperdebatkan), karena budaya Indonesia Timur sudah mengalami akulturasi budaya, sehingga *pure of culture* (budaya murni) sudah mengalami pergeseran. Namun demikian dari sudut pandang sosio-antropologis menurut Ki Hadjar Dewantara, manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah karena manusia berbudaya, sementara makhluk lain tidak berbudaya. Salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalan budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda, manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri.

Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara dikembangkan dari buku Ki Hadjar Dewantara bagian pertama (1962) adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Maka hak setiap individu hendaknya dihormati dengan jalan:(a) pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; (b) pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; (c) pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; (d) pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan hara diri; (e) setiap orang harus hidup sederhana dan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kebahagiaan para peserta didiknya.

Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (*care and dedication based on love*). Manusia merdeka menurut Ki Hadjar adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang (lebih humanis). Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan sebagai manusia yang utuh berkembang. Oleh Ki Hadjar Dewantara membaginya dalam tiga kategori, yaitu daya cipta (kognitif), daya karsa (efektif), dan daya karsa (konatif). Hal ini bermuara pada bagaimana membangun "*educate the head, educate the heart, dan educate the hand*".

Ki Hadjar Dewantara (di Nukil dalam Wasita Agust./Sept. 1929 Djilid I No. 11/12) (1967: 3-4) pernah berkata: *“pada djaman sekarang kita mengalami sendiri kekasaran tingkah laku kita sebagai buahnja pergaulan kita dengan bangsa asing; kita menghina dan merendahkan seni dan bahasa sendiri karena kita terlampau gandrung (tjinta) pada hidup kebaratan; kita meninggalkan kepandaian gending dan mengalihkan perhatian pada jazz atau dansa (tajub Eropah) yang dilakukan dengan berpeluk-pelukan oleh laki-laki dan perempuan di muka publik; kita merendahkan agama, karena kena pengaruhnja materialisme Eropah (tjinta pada barang lahir); kita mulai suka minuman keras, seolah-olah memberi kekajaan pada kapitalis; tjukuplah kiranja kalau saja terangkan demikian: kultur kita terdesak oleh kultur Eropah; ini adalah baiknja, tetapi bahaja jang besarpun nampak membajang. Sekalipun bahaja itu tentu ada, akan tetapi sesungguhnya besar ketjilnya, banjak sedikitnja, berbahaja atau tidaknja itu boleh dikata tergantung pada kita sendiri. Artinja kita sendirilah asal dengan teguh hati dapat mengurangi bahaja itu. Alatnya untuk mengurangi bahaja itu adalah: ...pendidikan, pendidikan pada anak-anak kita, pada orang-orang banjak dalam masyarakat kita. Dan jang tak boleh kita lupakan jaitu:...pendidikan nasional, jaitu mendidik rakjat kita untuk keperluan kita dengan mengindahkan kultur (dasar-dasar kehidupan) kita.*Bercermin pada nasihat Ki Hadjar Dewantara ini, maka MEA boleh datang dengan segala tetek-bengeknya, asalkan kita masyarakat Maluku Utara dalam menata pendidikan selektif untuk memilah dan memilih serta men-deletenya dalam hidup kita, maka kita akan tetap menjadi bangsa sendiri yaitu bangsa Indonesia karena kita adalah tuan rumah. Orang luar (orang asing) tidak boleh mengutak-atik isi rumah, apalagi mempengaruhinya, merubahnya, dan meminta untuk mengikutinya.

SIMPULAN

Otonomi sekolah dengan kurikulum lokalnya sebagai penciri bagi suatu daerah akan memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, termasuk Maluku Utara yang kebanyakan masyarakatnya hidup di daerah pesisir. Otonomi daerah membuka ruang untuk daerah membenahi pendidikannya, dan masyarakat pesisir Maluku Utara harus menjadi perhatian khusus karena potensi perikanan, terumbu karang, hutan bakau, pulau wisata bahari, dan lain-lain tidak tersentuh oleh tangan-tangan terampil, karena tidak dibelajarkan di bangku pendidikan. Belum lagi potensi lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat yang amat sangat beragam yang cenderung diabaikan. Padahal semua

ini adalah fondasi penopang kekuatan nasional dan keutuhan NKRI. Seiring berjalannya waktu, *Asean Economy Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) hadir dan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara. Jika pendidikan masyarakat Maluku Utara tidak berkualitas dan mengabaikan nilai-nilai lokalnya, maka *output* pendidikan akan menjadi penonton dan budak di negerinya sendiri. Pendidikan Maluku Utara perlu diletakkan fondasinya sesuai apa yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Dahuri R. *et al.* 2001. *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Danuredjo. 1977. *Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan*. Jakarta: Penerbit Laras.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalal, Fasli. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Kontek Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Ki Hadjar Dewantara. 1962. *Karja Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama*. Yogyakarta. Madjelis-Luhur Persatuan Taman Siswa.
- _____. 1967. *Bagian II A: Kebudajaan*. Jogjakarta: Madjelis-Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Latama, G. *et al.* 2001. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www>. Akses 11 Mei 2016.
- Majalah Demersial. 2007. *Pentingnya Tata Ruang dalam Pembangunan Wilayah Pesisir*. Berita Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 14 Juni 2007.
- Nugroho, D. Riant. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Saleh, Syarif. 1963. *Otonomi dan Daerah Otonom*. Jakarta: Penerbit Endang.
- Wayong J. 1979. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djembatan
- Zamroni. 2000. *Pradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.